

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAWAT YANG BERPRAKTIK TANPA DILENGKAPI PERSYARATAN IZIN PRAKTIK ( Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan )**

Pola pikir yang ada dalam masyarakat saat ini merupakan pandangan yang salah, karena dalam praktiknya perawat memiliki tanggungjawab dan kode etik yang berbeda dengan dokter sesuai dengan keahlian di bidang ilmunya. Dalam pelayanan kesehatan perawatan dan dokter memiliki tanggungjawab dan tugas berbeda sehingga ada aturan yang mengatur tentang kode etik tenaga kesehatan. Setiap profesi tenaga kesehatan tidak akan tercampuri dengan keahlian yang lainnya karena sudah ada ikatan aturan yang mengatur profesi tenaga kesehatan. Kesalahan yang banyak dilakukan tenaga kesehatan dan masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, permasalahan untuk masyarakat tidak bisa membedakan antara perawat dan dokter, kemudian tidak mengetahui perawat yang memiliki izin praktik, masyarakat melakukan upaya kesehatan dengan alasan jangkauan dekat dengan tenaga medis, kesalahan tenaga medis melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam praktiknya tenaga kesehatan sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

Perumusan masalah dalam skripsi memuat tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik perawat yang tidak mempunyai izin praktik, kemudian apa sanksi terhadap perawat yang tidak mempunyai izin praktik yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam keadaan emergency. Tujuan perumusan masalah ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik perawat yang tidak mempunyai izin praktik dan untuk mengetahui sanksi terhadap perawat yang memberikan pelayanan kesehatan dalam keadaan emergency.

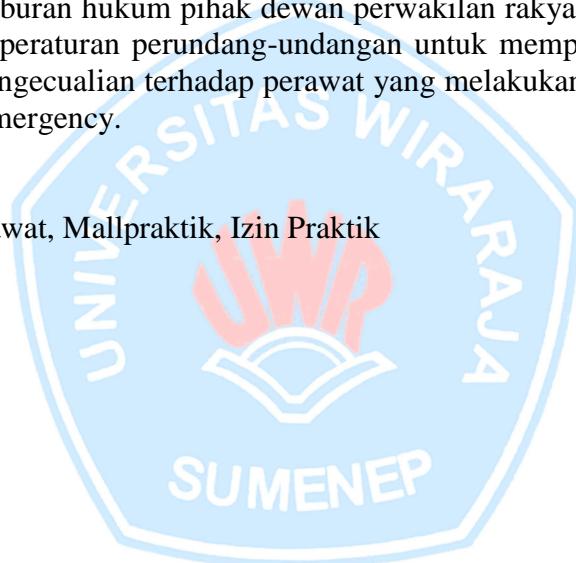
Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui bahan hukum primer. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundangan yang berlaku, permasalahan, penulisan skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini analisis bahan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap konsumen sangat berdampak terhadap keberadaan konsumen itu sendiri sekaligus kepada pelaku usaha/jasa. Tujuan pemberian perlindungan konsumen oleh undang-undang tersebut sebagai penyelenggara, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha/jasa dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Pihak

pelaku usaha/jasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap konsumen apabila pelaku usaha/jasa tidak bertanggungjawab terhadap konsumen maka ada sanksi tegas yang mengatur.

Sebagaimana dalam pembahasan seorang perawat dikatakan mallpraktik ketika tidak memiliki izin praktik tetapi melakukan atau memberikan izin praktik. Dalam hal mallpraktik pasien sebagai konsumen pengguna jasa dalam bidang kesehatan dapat menuntut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk kerugian yang diderita. Bentuk penerapan sanksi terhadap tenaga kesehatan perawat yang tidak memiliki izin praktik tapi tetap melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang melakukan upaya kesehatan, dalam hal ini tenaga kesehatan perawat apabila melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang sudah memiliki izin praktik maka ada sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Guna tidak terjadi kekaburuan hukum pihak dewan perwakilan rakyat yang memiliki tugas sebagai legislasi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas pasal perpasal tentang sanksi pengecualian terhadap perawat yang melakukan pelayanan kesehatan dalam keadaan emergency.

**Kata Kunci:** Perawat, Mallpraktik, Izin Praktik



## **ABSTRACT**

### **JURIDICIC REVIEW OF NURSING WITH PRACTICE WITHOUT COMPLETE PRACTICAL PERMISSION REQUIREMENTS**

(Judging from Law Number 36 Year 2014 Regarding Health Workers)

The current mindset in society is a wrong view, because in practice nurses have responsibilities and codes of conduct that differ from doctors according to their expertise in the field of science. In health care services and doctors have different responsibilities and duties so there are rules governing the code of ethics of health workers. Every health professional profession will not be interfered with other expertise because there are already binding rules that govern the health professional profession. Mistakes that are often made by health workers and the community have become a habit that is often done, problems for the community can not distinguish between nurses and doctors, then do not know nurses who have permission to practice, people make health efforts by reason of outreach to medical personnel, medical personnel errors conduct health services not in accordance with the field of expertise, in practice health workers already have different functions and tasks to avoid mistakes in health services.

The formulation of the problem in the thesis contains the form of legal protection for nurses' malpractices victims who do not have a license to practice, then what are the sanctions on nurses who do not have a practice license that performs health services to the community in an emergency. The purpose of the formulation of this problem is to find out what form of legal protection for patients who are victims of nursing who do not have a license to practice and to find out sanctions against nurses who provide health services in an emergency.

The method in writing a thesis uses the normative type through primary legal materials. Sources of legal materials are obtained from applicable laws, problems, writing this thesis first to make an inventory or collect legal materials related to the problem and classify legal materials and be analyzed systematically in accordance with the facts that occur and in this study the analysis of materials using descriptive qualitative analysis.

Legal protection provided by the law to consumers greatly affects the existence of consumers themselves as well as business / service actors. The purpose of providing consumer protection by the law as the organizer, development and regulation of consumer protection that is planned to increase the dignity and awareness of consumers, and indirectly encourage business / service actors in carrying out their business activities with full sense of responsibility. Business / service actors have full responsibility towards consumers if the business / service actor is not responsible to consumers, there are strict sanctions that govern.

As in the discussion of a nurse it is said malpractice when not having a practice license but doing or giving a practice permit. In the case of malpractice, patients as consumers of service users in the health sector can sue if things happen that are not desirable to the party responsible for the loss suffered. Forms of application of sanctions on nurses who do not have a license to practice but continue to provide health services to the public who make health efforts, in this case nurses health workers when practicing as if health workers already have a license for practice there are sanctions imprisonment and criminal fines in accordance with applicable regulations. In order to avoid legal obfuscation, the House of Representatives, which has the duty to legislate legislation, to clarify the article of the article concerning sanctions for the exclusion of nurses who perform health services in emergencies.

**Keywords:** Nurse, Malpractices, Practice License

